

Rekonstruksi Pelaporan Keuangan Daerah Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Olivia Pamilangan Andilolo ✉, **Cherly Elisabeth Tanamal** ²

^{1,2} Universitas Atma Jaya Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi Pelaporan Keuangan menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil penelitian menunjukkan Tana Toraja tidak mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian karena Kinerja Keuangan di Tana Toraja belum maksimal. Kurangnya Sumber Daya manusia, tidak menerapkan E-budgeting dan E-Report, Penerapan SAP tidak optimal dan Pembenahan SKAD.

Kata Kunci: *SDM, E-Budgeting, E-Report, Penerapan SAP, Pembenahan SKAD.*

Abstract

This study aims to re construction Financial Reporting towards Unqualified Opinion. The results showed that Tana Toraja did not get Unqualified Opinion because the Financial Performance in Tana Toraja had not been maximized. Lack of human resources, not implementing E-budgeting and E-Report, SAP implementation is not optimal and SKAD improvement.

Keywords: *HR, E-Budgeting, E-Report, SAP Implementation, Improving SKAD.*

Copyright (c) 2023

✉ Corresponding author : Olivia Pamilangan Andilolo

Email Address :

PENDAHULUAN

Penelitian ini menjadi sangat penting karena dilandasi oleh belum kuatnya fondasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tana Toraja dan juga karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja belum begitu baik selama ini ditandai dengan empat kali berturut-turut meraih WDP sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, bahkan tahun 2015 terjebak dalam opini Tidak Wajar, dan belum pernah sekalipun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak lima tahun terakhir ini. Sementara itu potensi untuk peningkatan kualitas laporan keuangan masih memungkinkan di tahun-tahun berikutnya, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan efektifitas dan efisiensi peran sistem pengendalian intern serta peningkatan pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintahan, terlebih lagi dengan kehadiran teknologi informasi dapat mendapat daya dukung dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja, meskipun saat ini pandemik Covid-19 melanda. Dengan demikian perlu upaya rekonstruksi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tana

Toraja untuk meningkatkan kualitas dan kewajarannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar akuntansi pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan peningkatan keterbandingan dan kehandalan laporan keuangan baik terhadap anggaran, laporan antara periode, maupun laporan ke dan dari responden. Laporan keuangan yang disebutkan dalam SAP ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Laporan tujuan umum adalah laporan keuangan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar stakeholder. Untuk mencapai tujuan tersebut, SAP menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum (Zeyn, 2011). Setiap laporan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus berangkat dari penerapan SAP. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelaporan senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dianut dalam standar akuntansi pemerintahan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan mewajibkan setiap entitas pelaporan melaporkan setiap kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode tertentu untuk menjamin akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Penerapan SAP dapat dilakukan penyusunan laporan keuangan yang useful. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, agar laporan keuangan menjadi berisi dan bermakna. Hal ini menjadi tujuan dari penerapan SAP.

METODOLOGI

Penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni suatu pendekatan yang menggunakan data-data verbal tulisan atau lisan yang diperoleh dari sumber informasi (informan). Dari data yang diperoleh di lapangan lalu kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif kualitatif dengan memakai konsep triangulasi untuk melahirkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi pada beberapa fenomena yang mirip atau serupa. Sumber data yaitu Data primer dan Data Sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang terlibat dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara online mengingat saat ini masih dalam kondisi Pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Laporan Keuangan Kabupaten Tana Toraja sejak 5 tahun terakhir menunjukkan trend opini yang belum terlalu mengembirakan karena didominasi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Bahkan tahun 2015 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja menunjukkan opini Tidak Wajar (TW), walaupun kemudian pada tahun 2016 – 2019 berhasil mendapatkan opini WDP. Meski demikian raihan ini belum terlalu mengembirakan karena sejak lima tahun terakhir ini Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, belum sempat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja masih menyisakan beberapa

catatan-catatan yang harus disempurnakan kedepannya terkait dengan kesesuaian laporan keuangannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Salah satu penyebab rendahnya opini Kabupaten Tana Toraja untuk masa tahun 2015 -2019 adalah kurangnya bukti dokumentasi dan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah yang menyebabkan nilai neraca berbeda dengan nilai yang diberikan oleh penilai independen (Helmizar, 2018).

Tabel 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 – 2019

No.	Tahun/Periode	Opini Auditor	Keterangan
1	2015	Tidak Wajar	TW
2	2016	Wajar Dengan Pengecualian	WDP
3	2017	Wajar Dengan Pengecualian	WDP
4	2018	Wajar Dengan Pengecualian	WDP
5	2019	Wajar Dengan Pengecualian	WDP

Sumber: BPK RI, 2020

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang ditunjukkan dengan capaian WDP paling tinggi selama lima tahun terakhir diperparah dengan defisit anggaran yang diderita oleh sebesar Rp. 64 Milyar. Rendahnya kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tentu tidak terlepas dari berbagai persoalan, termasuk persoalan birokrasi dan manajemen keuangan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja. Rendahnya kinerja keuangan Kabupaten Tana Toraja juga didukung oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini diakui oleh Hella Santika Pala'lang sebagai staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui hasil wawancara dalam masa pandemi Covid-19 ini yang mengatakan bahwa ada beberapa oknum yang terlibat penyelewengan kas sehingga terjadi kebocoran kas dalam lingkungan pemerintah kabupaten Tana Toraja.

Rekonstruksi pelaporan keuangan tentu bukan hanya dari mekanisme penyusunan laporan keuangannya tetapi juga oleh mentalitas SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja, dan hal ini harus dilakukan secara cepat dan perlu ditangani secara serius untuk melahirkan SDM yang berkualitas, compatible dan memiliki wawasan yang luas demi pengabdian kepada bangsa dan negara. Ke depannya tantangan dan hambatan semakin sulit sehingga dibutuhkan SDM yang memiliki daya saing, serta integritas yang kuat dalam mengawal pencapaian target Kabupaten Tana Toraja menuju opini Wajar Tanpa Pengecualitan (WTP).

Dengan demikian, senada dengan peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah menjelaskan beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, seperti:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja diarahkan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja. Pendekatan ini akan menggerser dan mengarahkan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja yang terukur dari aktivitas dan program kerja. Dalam pendekatan ini adanya tolok ukur yang dapat memberikan kemudahan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam upaya untuk mencapai tujuan opini WTP. Karakteristik

yang dapat dijumpai dalam pendekatan ini adalah proses klarifikasi anggaran yang didasarkan pada kegiatan dan juga didasarkan pada unit analisis yang tajam yakni unit organisasinya. Anggaran yang telah diasosiasikan dalam program kerja dan kegiatan yang ada akan memberikan kemudahan bagi pihak yang berkepentingan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja untuk melakukan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja keuangan ini dapat dimulai dengan menetapkan beberapa indikator yang relevan. Sementara itu, indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (output) dan Hasil (outcome) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari Kegiatan.

Peraturan Pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ini mengarahkan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Dengan pendekatan ini akan memangkas kurangnya informasi tentang keluaran dan hasil dalam dokumen penganggaran. Dengan demikian peraturan pemerintah ini dapat membantu menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran. Adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen diharapkan mampu meningkatkan pencapaian kualitas penganggaran pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja dalam mewujudkan sinkronisasi antara berbagai bidang yang ada dalam lingkungan pemerintahan terutama bagian perencanaan dan penganggaran demi terwujudnya kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dari sebelumnya.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Restrukturisasi berikutnya adalah pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini sedapat mungkin dapat dijalankan dengan menggunakan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Hal ini akan mempengaruhi anggaran yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan dapat meminimalisir jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintahan Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

Mekanisme ini mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah. Mekanisme ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam OPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada OPD atau Unit-unit yang adalah dalam OPD merupakan implementasi dari pelimpahan wewenang pelaksanaan anggaran belanja yang memungkinkan untuk sesuai dengan tujuan awal yang telah direncanakan yakni terjadinya penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Dalam upaya menuju opini WTP maka kendali utamanya adalah pada Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Pertanggungjawaban ini diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, unsur yang paling penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah selain dari unsur-unsur yang lain adalah unsur pelaporan pertanggungjawaban ini. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga bisa dalam bentuk laporan realisasi atau realisasi kinerja. Melalui mekanisme pelaporan ini pula, masyarakat dapat mengakses kinerja Pemerintah Daerah Tana Toraja dari waktu ke waktu. Selain itu pula, pelaporan ini dapat digunakan sebagai media untuk memelihara sistem sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah Tana Toraja.

Melalui mekanisme pelaporan ini pula, pihak terkait dalam lingkaran pemerintah daerah Tana Toraja dapat melihat hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan untuk kepentingan perbaikan dan penyempurnaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran daerah pada tahun-tahun ke depannya. Dengan rekonstruksi seperti ini dengan mengambil beberapa kebijakan-kebijakan yang didasarkan prinsip, landasan, azas, dan perangkat umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Tana Toraja dapat menciptakan tata tertib Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih wajar dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dan mendorong untuk menaati setiap peraturan perundang-undangan yang ada serta meninjau merekonstruksi Sistem Keuangan Daerah secara berkelanjutan dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan, serta mencapai target pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja untuk beranjak dari WDP menuju WTP. Semoga.

Berpijak dari beberapa tahapan di atas menggambarkan bahwa Kabupaten Tana Toraja masih memiliki banyak pekerjaan rumah ke depan untuk membenahi sistem

keuangan daerahnya, karena selama ini masih banyak tahapan yang tidak diselenggarakan dengan baik sehingga memudahkan petugas atau pengelola keuangan daerah untuk melakukan penyimpangan dan kesalahan sistem maupun prosedur pencatatan keuangan. Hal ini memerlukan penanganan dengan serius.

KESIMPULAN

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja belum menggembirakan karena dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK lima tahun terakhir opini yang dihasilkan didominasi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan di tahun 2015 diperoleh opini Tidak Wajar (TW). Penyebab rendahnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja disebabkan oleh beberapa hal di antaranya;

- a) Adanya beberapa aset yang dikuasai bahkan dimiliki oleh perseorangan atau kelompok namun belum dihapus dari laporan keuangan pemerintah daerah,
- b) Terjadinya kebocoran dana dalam lingkup pemerintah daerah sampai Rp. 400.000.000,
- c) Pengelolaan dana bergulir yang tidak transparan dan akuntabel.

Dari pemaparan tersebut menyatakan bahwa OPD Tana Toraja membenahi antara lain:

- a) SDM dengan Recruitmen, Pelatihan dan Pendidikan juga menggunakan Sistem Komputerisasi seperti E-budgeting, E-Report.
- b) Penerapan & Optimalisasi SAP yang harus diperhatikan agar proses penyusunan dapat berjalan dengan baik sehingga post-post transaksi sudah sesuai.
- c) Membenahi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD) dalam hal Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penata Usahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, maka perlu disarankan sebagai berikut:

1. Membangun sinergitas dalam seluruh komponen aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk mencapai target Opini Kabupaten Tana Toraja dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Untuk mewujudkan target tersebut, maka diminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk menertibkan pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja agar tidak menjadi temuan, menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dana masyarakat serta mengelola dana bergulir secara transparan dan akuntabel.
3. Meminta kepada seluruh OPD yang ada untuk secara kompak melakukan restrukturisasi penyusunan laporan keuangan, agar Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dapat meraih predikat WTP.

Bagi para Akademis semoga dapat bermanfaat untuk penelitian berikutnya dan dapat memperdalam pengetahuan tentang Penyusunan Laporan Keuangan.

Referensi:

- Adhi, Daniel Kartika & Suhardjo, Yohanes. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 5 No. 3, p.93-111.
- Arfianti, Dian. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang, InstitutionalRepository Universitas Diponegoro.
- Arfianti, Muhammad Naufal., Handajani, Lilik., & Alamsyah, H. 2016. Kualitas Laporan Keuangan dan Kepercayaan Stakeholder (Studi pada Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Mataram), *JAFFA*, Vol. 4 No. 2, p.121-144
- BPK RI.2015. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis AkruaI Tahun 2014 dan 2015 Triwulan III, <https://yogyakarta.bpk.go.id/penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-atas-efektifitas-upaya-pemerintah-daerah-dalam-implementasi-sap-berbasis-akruaI-tahun-2014-dan-2015-triwulan-iii/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020.
- BPK RI. 2019. Kabupaten Tana Toraja, https://makassar.bpk.go.id/?page_id=14939, diakses pada tanggal 11 Maret 2020.
- Darwanis & Mahyani, Desi Dwi. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 2 No. 2, p.133-151.
- Efendi, Loli., Darwanis, & Abdullah, Syukriy. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 3 No. 2, p.182-195.
- Eriva, Cut Yunina., Islahuddin & Darwanis. 2013. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja dan Jabatan Terhadap Pemahaan Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Aceh), *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 2, p.1-14
- Helmizar, 2018. Problematika Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI*.
- KBBI, 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kualitas>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., & Wartfield, Terry D.. 2011. *Intermediate Accounting ; IFRS Edition, Volume 1*, John Wiley & Sons, USA.
- Kusumo, Grani Ramadhani & Dewi, Herlina Rahmawati. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul). *Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*.
- Lasoma, Vickty Agustian., 2012. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, *Jurnal Akuntansi*, Vol 2 No. 1.
- Mahaputra, I Putu Upabaya Rama., & Putra, I Wayan. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 8 No. 2, p.230-244.
- Mahsun, Moh., dkk. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Martani, Dwi, Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, dan Edward Tanujaya, 2012, *Akuntansi Keuangan Menengah ; Berbasis PSAK*, Jakarta, Salemba Empat.
- Nugraeni & Budiantara, M. 2015. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal*

- Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Unisnu Jepara, Vol. 12 No. 1, p.18-32
- Nurillah, As Syifa., & Muid, Dul. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3 No. 2, p.1-13.
- Murapi, I. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Infestasi*, Vol. 12 No. 2, p.131-143.
- Pradono & Basukianto. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, Vol 6 No. 2, p.14-28.
- Pujanira, Putriasri., & Taman, Abdullah. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, Vol 6. No. 2, p.14-28.
- Republik Indonesia. 2003. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara..
- , 2008, Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- , 2010. Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- , 2019. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rosariana, Yosephine Eska Martina. 2018. Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Gereja Berdasarkan PSAK, Digital Repository Universitas Jember.
- Setiawati, Erma & Sari, Shinta Permata. 2014. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta). *Artikel Seminar Nasional, Program Studi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Setyowati, Lilis., Isthika, Wikan., & Pratiwi, Ririh Dian. D. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang, *Jurnal Kinerja*, Vol. 20 No. 2, p.179-191.
- Singkali, Yani Fransiska, dan Widuri, Retnaningtyas. 2014. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara, *Tax & Accounting Review*, Vol. 4 No. 2.
- Surastiani, Dyah Putri., & Handayani, Bestari Dwi. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 7 No. 2, p.139-149
- Trisaputra, Andry. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Artikel Ilmiah, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*.
- Yadiati, Winwin & Mubarak, Abdullah. 2017. *Kualitas Pelaporan Keuangan; Kajian Teoritis dan Empiris*, Jakarta; Kencana Prenadamedia Group.
- Yuliani, N.L., & Agustini, R.D. 2016. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, Vol. 14 No. 1, p.56-64.
- Yuliani, S., Nadirsyah, & Bakar, U. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 3 No. 2, p.206-220.

Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat*